



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA PHP GUBERNUR, BUPATI & WALIKOTA

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS
PERKARA PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan kemudahan *Access To Justice* bagi para pencari keadilan dalam berperkara di MK dengan administrasi lembaga peradilan MK yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)”

”

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“ Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

Kemudahan Akses Berperkara di MK

01

Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik

02

Website Mahkamah Konstitusi

03

Portal Informasi Pilkada 2020

04

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05

Click MK

06

Case Tracking dan Case Retrieval

07

Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08

Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang



Teknologi Informasi & Komunikasi di MK:

- ✓ Database Calon Peserta Pemilu (Sumber DCT KPU)
- ✓ Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui email Para Pihak
- ✓ Data Dashboard PHP Pilkada Online
- ✓ Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK
- ✓ Live Digitalisasi Online Dokumen Perkara
- ✓ Persidangan Jarak Jauh
- ✓ Streaming Persidangan MK
- ✓ Case Tracking & Case Retrieval
- ✓ Perlindungan Pusat Data Bekerjasama dengan BSSN
- ✓ Click MK
- ✓ Konsultasi dan Tanya Jawab Online
- ✓ Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah bersertifikasi elektronik
- ✓ Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang

Pengajuan Permohonan Elektronik

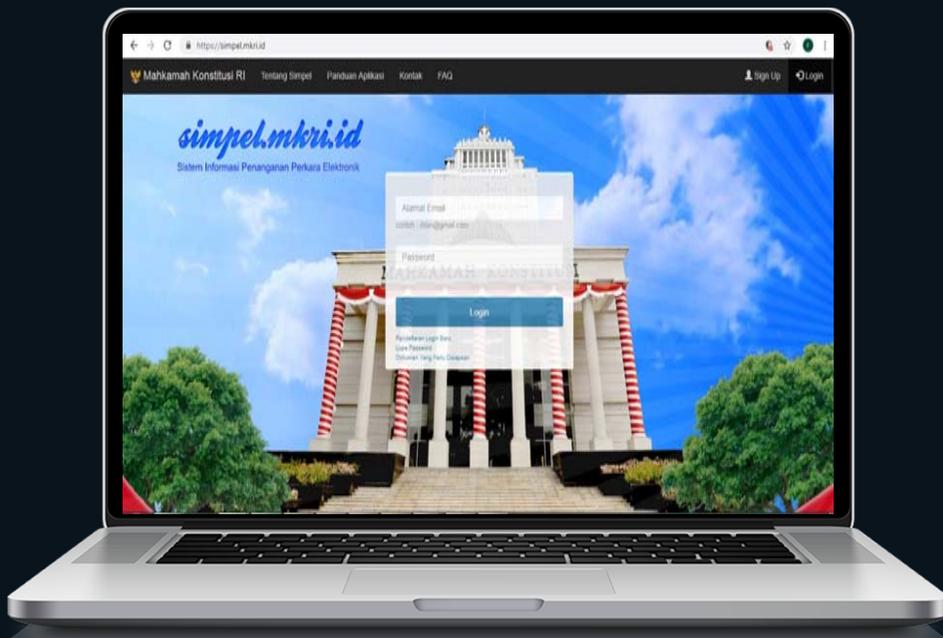
Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan *real-time* (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3)

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

SIMPEL (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERMOHONAN ELEKTRONIK)



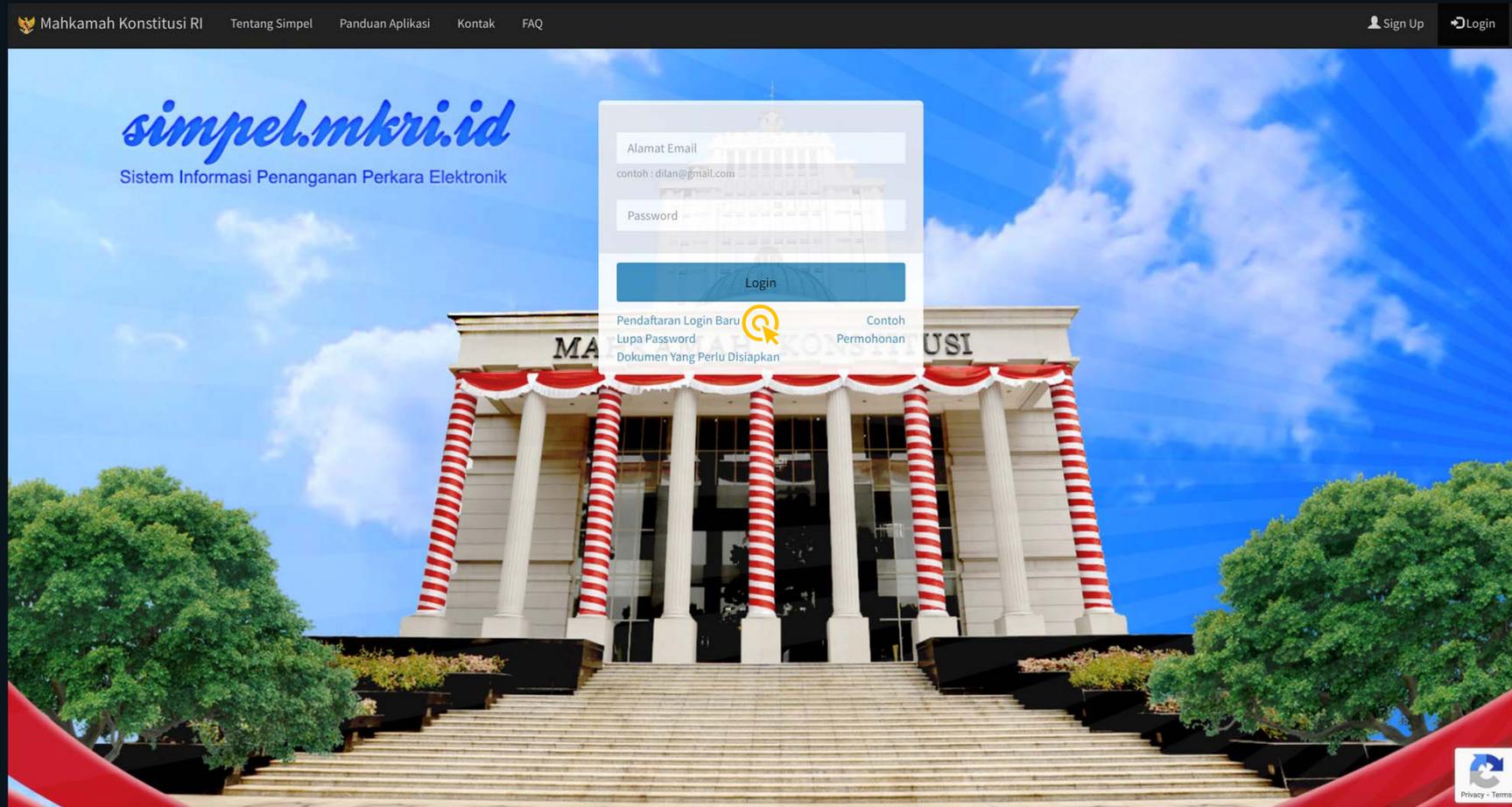
SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”

Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi simple, terlebihdahulu membuat akun dengan mengklik “Pendaftaran Login Baru”

Permohonan Elektronik Secara Online

Mahkamah Konstitusi RI Tentang Simpel Panduan Aplikasi Kontak FAQ Sign Up Login

simpel.mkri.id
Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Ishak Purnama
08121212121
ishak.purnama@gmail.com
.....

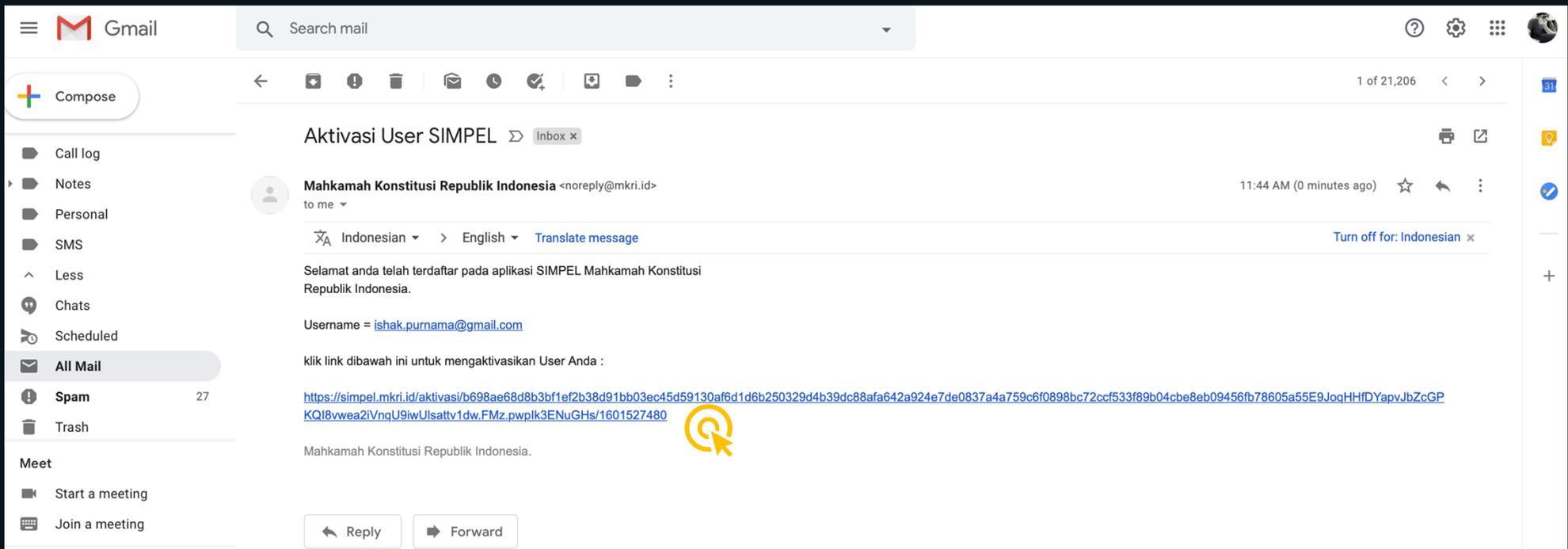
Register

Saya sudah punya akun

Privacy - Terms

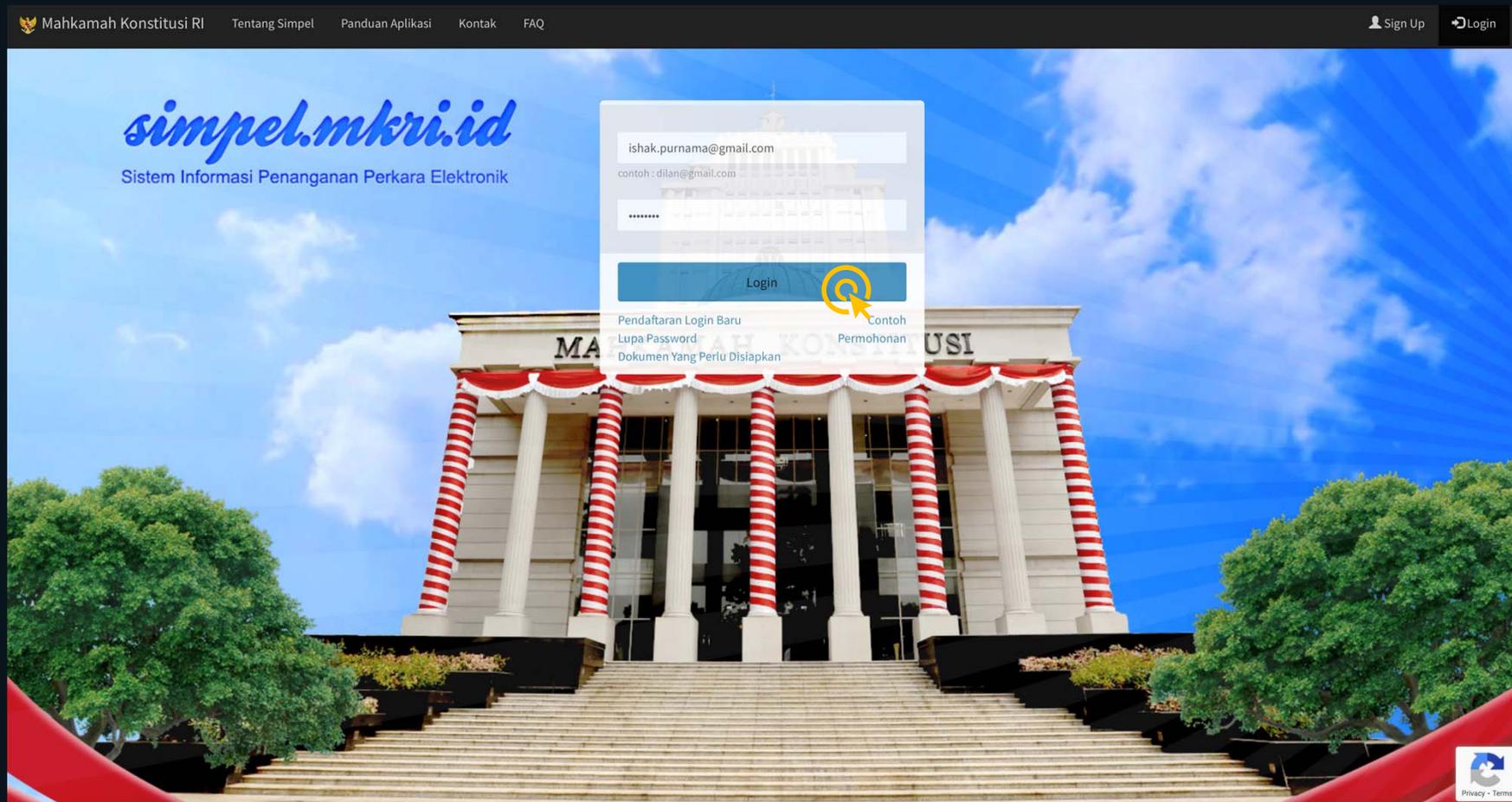
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah akun sudah teraktifasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpler

Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the user profile page on the SIMPEL.MKRI.ID website. The page is titled "Profil Pemohon" and shows the user's name "Ishak Purnama" with a profile picture. The user is logged in as "Ishak Purnama" and the page title is "SIMPEL.MKRI.ID". The user's profile information is as follows:

Field	Value
Nama	Ishak Purnama
Email	ishak.purnama@gmail.com
Password	Password Baru
Nomor Telepon	081210471812
Nomor KTP *	
File KTP *	Choose File no file selected File type harus .jpg .gif atau .png Belum ada file KTP

Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru bisa diakses

Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) dashboard interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled 'SIMPEL.MKRI.ID' and features a 'Permohonan' section with four colored cards, each showing a count of '0' and a 'Selengkapnya' link. The cards represent: Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden, and Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD). Below this is a 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with one card for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' widget showing a calendar for October 2020.

Permohonan

- 0 Pengujian Undang-Undang (PUU) [Selengkapnya](#)
- 0 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD) [Selengkapnya](#)

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota [Selengkapnya](#)

Kalender Sidang

2020 Oktober

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian klik menu PHP Kada untuk pengajuan Pe.rkara PILKADA

Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the user profile 'Ishak Purnama' and the system name 'SIMPEL (DEV)'. The main header displays 'Permohonan Online' for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. The breadcrumb trail is 'Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PHPKADA'. The main content area is divided into three steps: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The first step is active, showing a dropdown menu for 'Pemilihan Kepala Daerah' with the text 'Silahkan Pilih'. Below this is a text area for 'Uraian Pokok Permohonan'. A section titled 'Dokumen yg harus disiapkan:' lists the required documents: KTP Pemohon (dalam format .jpg), Email Pemohon, KTP Kuasa (dalam format .jpg) **, Email Kuasa **, Surat Kuasa (dalam format .pdf) **, File KTA/BAS (bagi advokat) **, Permohonan (dalam format .pdf), and Permohonan (dalam format .doc/.docx). A 'Keterangan:' section notes that '** Jika menggunakan kuasa pemohon'. At the bottom, there are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

Untuk mengajukan permohonan PHP Kada klik menu PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan

Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for 'Ishak Purnama', and a notification bell. The left sidebar contains a menu with options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHPU', 'PHP Kepala Daerah', 'Info Permohonan', 'Permohonan', 'Pihak Terkait', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', and 'Konsultasi'. The main content area is titled 'Informasi PHPKADA' and displays a table of application requests. The table has the following structure:

No	Nomor	Permohonan	Pemohon / Kuasa	Status	#
1	• No Online: /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020	Pemohon: • H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. • H. UU Ruzhanul Ulum, S.E. Tidak menggunakan kuasa	Menunggu diproses Kapaniteraan	

The status cell for the first row is highlighted with a yellow callout box containing an information icon and the text 'Menunggu diproses Kapaniteraan'. A magnifying glass icon is overlaid on the status cell, indicating that clicking it would likely lead to a print or download function for the application details.

Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the user profile 'Ishak Purnama' and the date 'Kamis, 01 Oktober 2020' with a digital clock showing '14:02:41'. The main content area is titled 'Informasi PHPKADA' and 'Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. A status bar indicates 'Menunggu diproses Kepaniteraan'. The application details include:

- Pokok Permohonan:** Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
- Nomor Online:** /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)

A QR code and the TTPPO logo are visible. Below this is the 'Data Pemohon' table:

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP
1	H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.	Bekasi	12121212121211	ishak.purnama@gmail.com	-	081210471812
2	H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.	Bekasi	12122121212121	ishak.purnama@gmail.com	081210471812	081210471812

The 'Berkas Permohonan' section contains a table of uploaded files:

NO	Nama Berkas	Keterangan	#
1	Permohonan	File Permohonan	
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	File Daftar Alat / Dokumen Bukti	
3	Alat Bukti	File Alat Bukti	
4	SK KPU	File SK KPU	

Halaman detail informasi permohonan.

Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

 SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > Kunjungan Sidang > Jadwal Sidang

[Jadwal Sidang Pemohon](#)

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

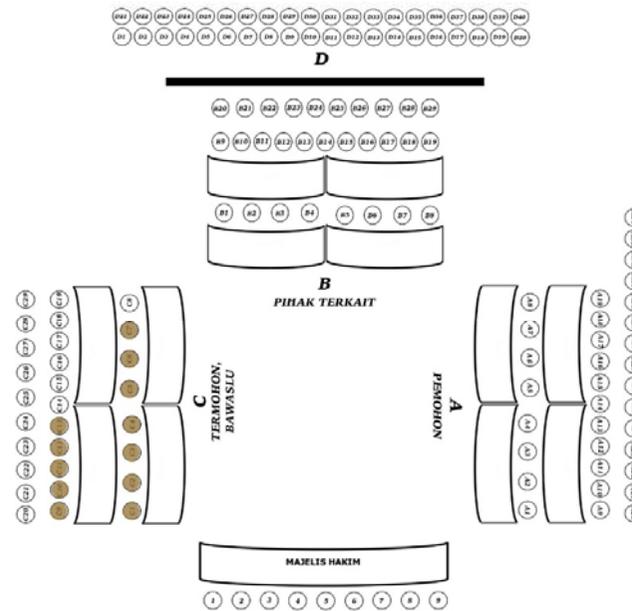
Kamis, 4 Oktober 2018
14:06:58

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

Penentuan Tempat Duduk Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3

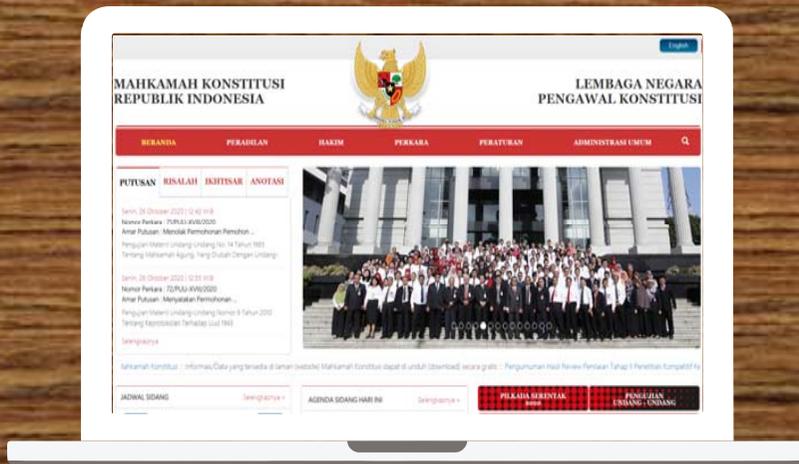


Denah ruang sidang

WEBSITE MK



Dapat diakses di
www.mkri.id



MENU WEBSITE

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



1 WAJIB MENGENAKAN
MASKER



2 PEMERIKSAAN
SUHU BADAN



3 MENCUCI TANGAN
DENGAN SABUN ATAU
HAND SANITIZER



4 MENEKAN TOMBOL LIFT
TIDAK DENGAN
JARI TANGAN



5 MEMATUHI
KAPASITAS LIFT HANYA
EMPAT ORANG



6 PRESENSI MASUK
DAN PULANG KERJA
MENGGUNAKAN
APLIKASI ONLINE



7 MENYAPA REKAN KERJA
TANPA KONTAK FISIK



8 MENJAGA KEBERSIHAN
AREA KERJA



9 RAPAT DENGAN
MENJAGA JARAK



10 BERBADAH MENGGUNAKAN
PERALATAN MASING-MASING



11 MENJAGA JARAK
SAAT MAKAN PADA
WAKTU ISTIRAHAT



12 MENJAGA DAN MEMASTIKAN
LINGKUNGAN SELALU BERSIH



13 SELAMA PERJALANAN PULANG
DARI KANTOR TETAP
MENERAPKAN
PROTOKOL KESEHATAN



14 MENGLIBAH POLA HIDUP
LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT,
DAN LEBIH BAIK



fb.com/ma



@ma



ma



ma



ma



ma



ma

... Pengum

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG

JADWAL SIDANG

Selengkapnya

esia TA 2020. ...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 ²	2	3	4
5 ⁴	6 ²	7 ³	8 ⁷	9	10	11
12 ³	13 ³	14 ⁴	15	16	17	18
19	20 ²	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keduanya
 L Libur



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



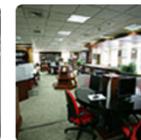
LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keduanya
 L Libur



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB
Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan
 Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB
UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK
 Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



Putusan Landmark



Majalah Konstitusi



Jurnal Consrev



Jurnal Konstitusi

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

[Selengkapnya](#)

Digital Signature
mk2091918333200212021814

Jh (download) secara gratis :::Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

JADWAL SIDANG

[Selengkapnya >](#)

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur



Siaran Pers



Pengumuman



INFORMASI ANGGARAN



BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

[+ Berita Sidang](#)

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



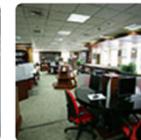
LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



MENU DAN PORTAL PILIHAN

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keduanya
 L Libur



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PROTOKOL KESAMAJUAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

0:00 / 2:41

2020 UNDANG - UNDANG

 Hakim Konstitusi	 Putusan	 Simpel.mkri.id	 Penelusuran Perkara
 Pusdik MKRI	 AACC	 LPSE MKRI	 JDIH
 Gedung MK	 Perpustakaan	 Pusat Sejarah Konstitusi	 Streaming dan Video Conference
 Putusan Landmark	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Consrev	 Jurnal Konstitusi

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB

DEWAN ETIK

HUBUNGI MK

WHISTLEBLOWING

MEDIA SOSIAL

PENGUNJUNG



Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2018

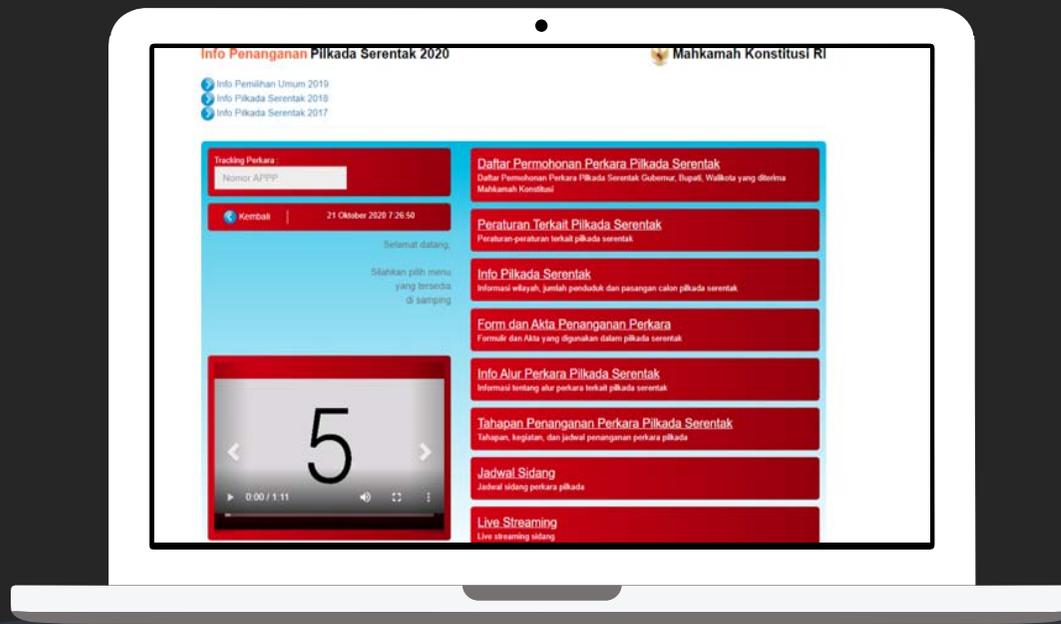


PROSES

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	22-10-2018	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 73/1/PAN.MK/2018	Permohonan AP3 dan DKPP
2	23-10-2018	Penerbitan APL dan DPKP2 dengan Nomor 72/2/PAN.MK/2018	APL dan DPKP2

Monitoring status perkara

Portal Informasi Pilkada 2020



Dapat di akses di
laman MK



Memberikan
informasi seputar
Pilkada 2020

CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018

[Home](#) | [Peraturan](#) | [Permohonan Online](#) | [Daftar Permohonan](#) | [Info Wilayah](#) | [Form](#)

 **Mahkamah Konstitusi RI**

[Dan Akta](#) | [Alur Perkara](#) | [Tahapan](#) | [Jadwal Sidang](#) | [Streaming](#)

Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018 APPP Nomor : 1/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018	<u>Pemohon:</u> K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum	<u>Kuasa Pemohon:</u> Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Perbaikan Permohonan 6. Keterangan Bawaslu 7. Perbaikan Permohonan 8. Jawaban Termohon 9. Keterangan Pihak Terkait	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
			<u>Termohon:</u> KPU Tegal	<u>Kuasa Termohon:</u> Ali Nurdin, S.H. S.T.		
			<u>Pihak Terkait:</u> H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.		
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018 APPP Nomor : 2/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018	<u>Pemohon:</u> DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	<u>Kuasa Pemohon:</u> Andi Lilling, S.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Keterangan Pihak Terkait 6. Keterangan Bawaslu 7. Jawaban Termohon 8. Kesimpulan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
			<u>Termohon:</u> KPU Pare-Pare	<u>Kuasa Termohon:</u> Marhumah Majid, S.H., M.H dkk		
			<u>Pihak Terkait:</u> Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> Anwar, S.H. dkk		



CLICK MK



Download on the



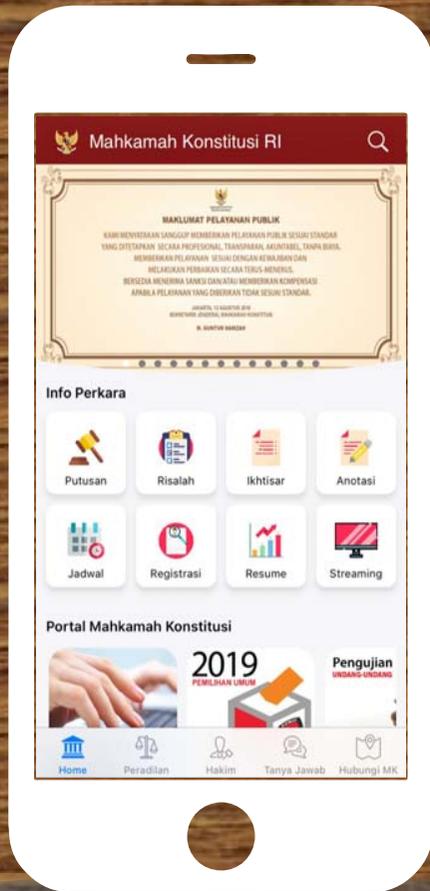
and





CLICK MK Versi Android





CLICK MK Versi iOS



Pelayanan Persidangan Live Youtube

Link :: <https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi>

The screenshot displays the YouTube channel interface for Mahkamah Konstitusi RI. At the top, there is a navigation bar with the YouTube logo, search bar (containing 'mkri live'), and icons for live streaming, grid view, notifications, and a profile picture. Below this is a large banner with the text '#MENGAWAL KONSTITUSI NEGARI' and 'BERSAMA'. The channel name 'Mahkamah Konstitusi RI' is prominently displayed with a verified badge and 39,7 rb subscribers. A 'DISUBSCRIBE' button is visible. Below the channel name are navigation tabs: BERANDA, VIDEO, PLAYLIST, KOMUNITAS, CHANNEL, and TENTANG. The main content area shows a grid of video thumbnails with titles and view counts. A QR code is overlaid on the right side of the page.

BANNER: #MENGAWAL KONSTITUSI NEGARI, BERSAMA

CHANNEL: Mahkamah Konstitusi RI, 39,7 rb subscriber

NAVIGATION: BERANDA, VIDEO, PLAYLIST, KOMUNITAS, CHANNEL, TENTANG

VIDEO GRID:

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** ▶ PUTAR SEMUA
- Diajukan Lewat Tenggang Waktu, Permohonan...** (2.02 views)
- Berbagai Keberatan Diungkap Pemohon PPHU Kab. Hulu...** (1.58 views)
- Hasil Pemilukada Aceh Barat Digugat** (1.56 views)
- MK Tolak Seluruh Permohonan Sengketa PSU...** (1.46 views)
- MK: Tonny-Frans, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Yape...** (2.02 views)
- Pihak Termohon Tanggapi Dal** (747 x ditonton)

QR CODE: A large QR code is overlaid on the right side of the page, likely linking to the channel's live streaming page.

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference melalui Aplikasi Zoom)

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference melalui Aplikasi Zoom)

Tata tertib persidangan jarak jauh merujuk kepada Bagian Keempat (Tata Tertib Sidang) Pasal 9 sampai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 (PMK 1/2020)

PMK 1/2020 Pasal 10

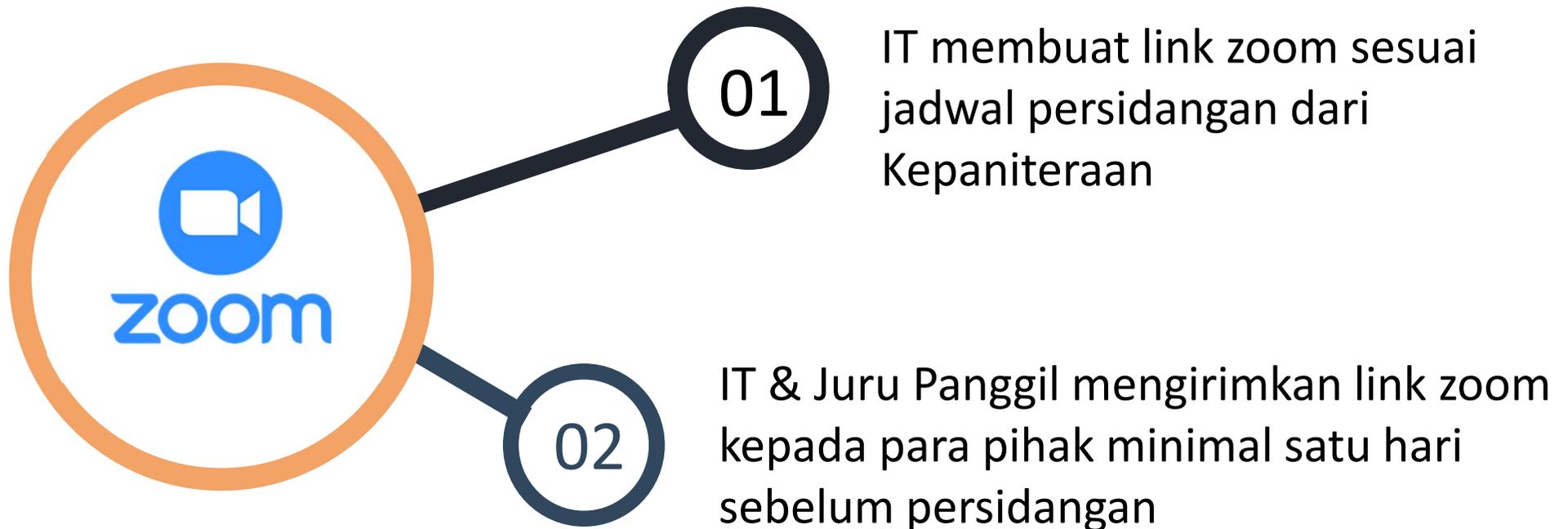
“Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis-mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.”

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference melalui Aplikasi Zoom)

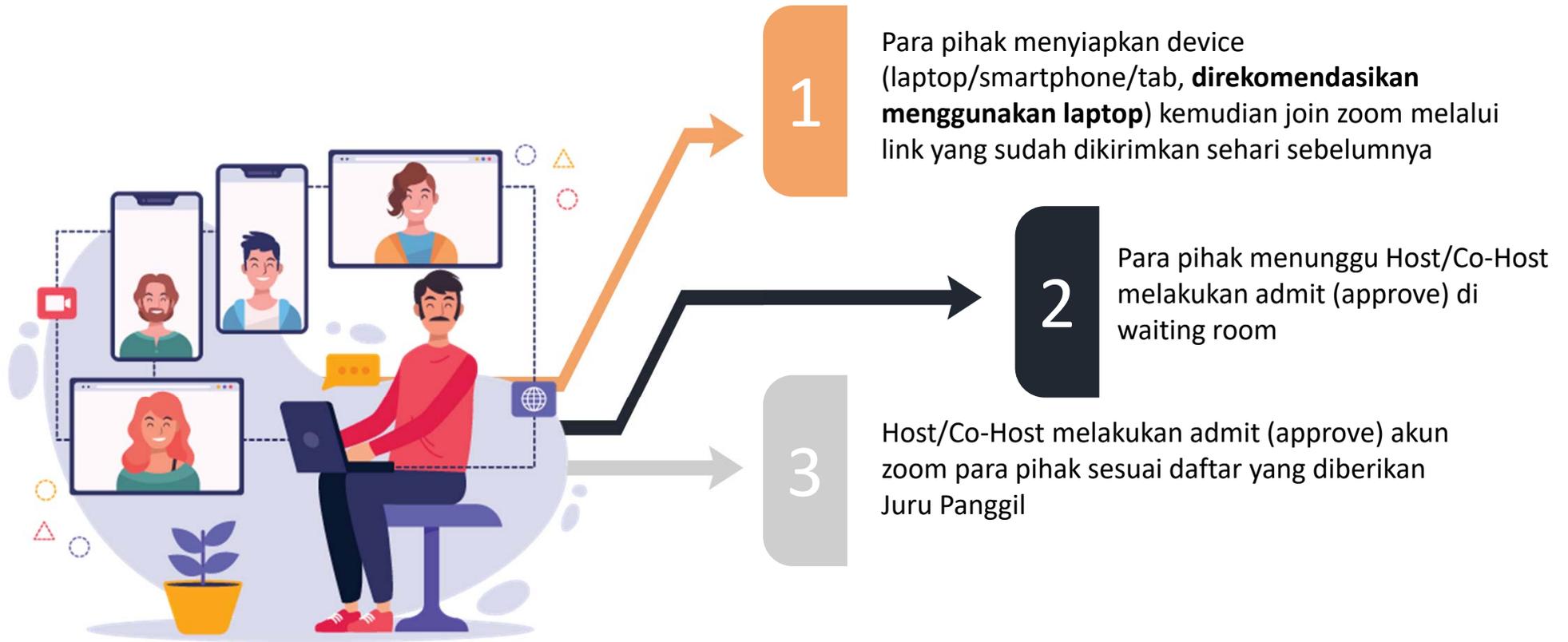


Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Zoom Meeting*)

Tahap Persiapan

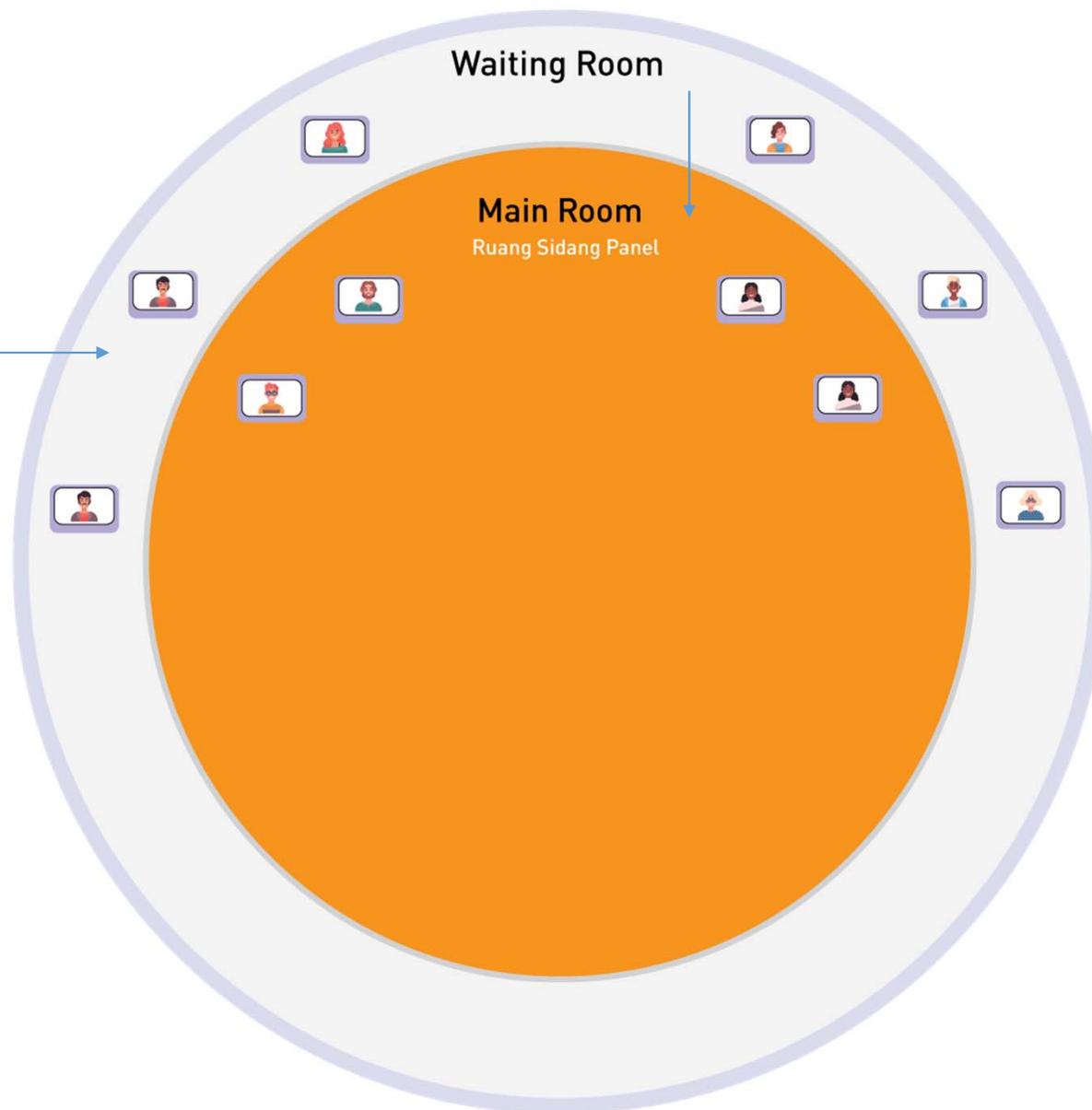


Alur Persidangan Jarak Jauh Menggunakan Aplikasi *Zoom Meeting*



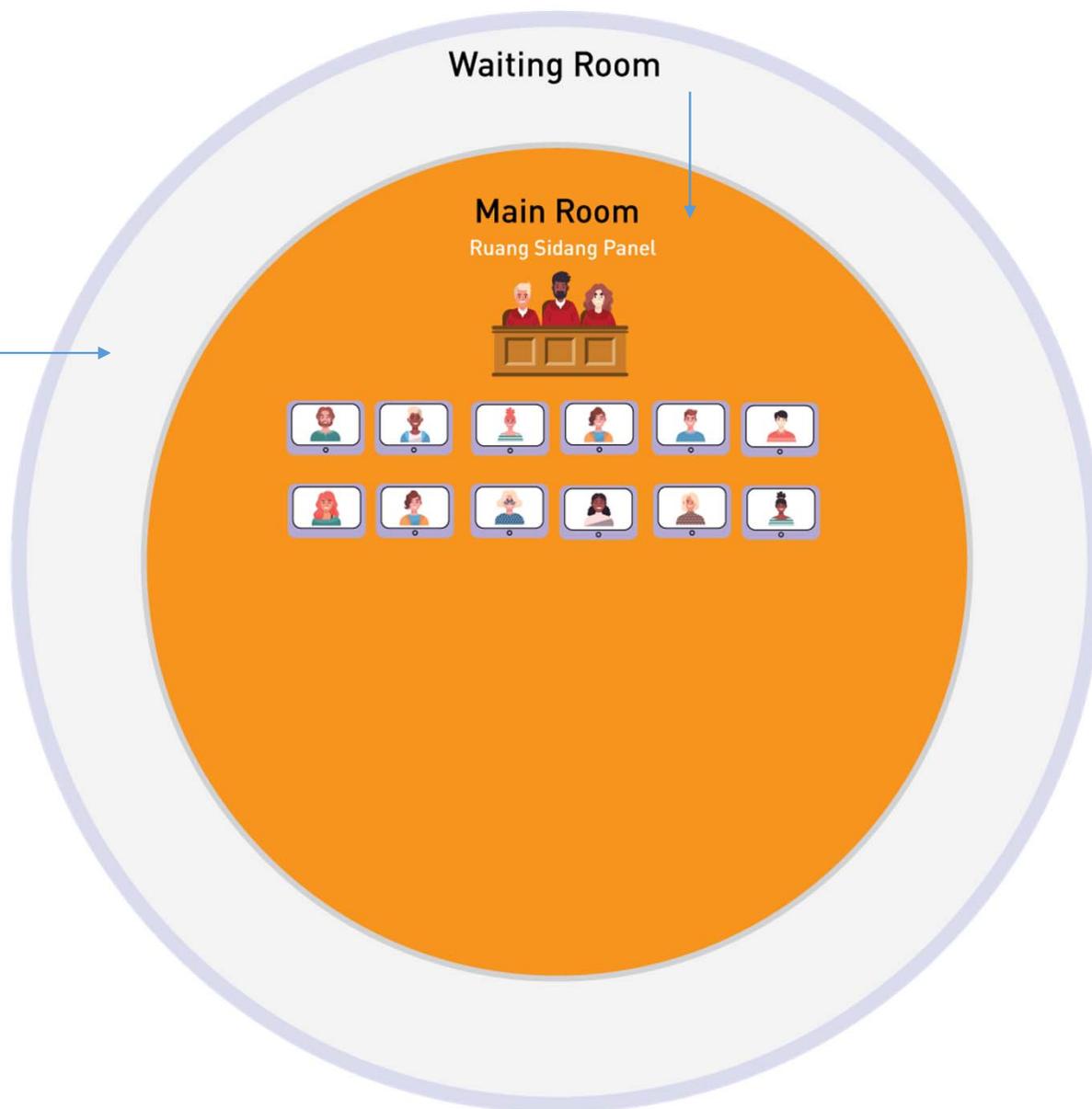
PENTING:

Peserta sidang wajib mematuhi Tata Tertib Sidang sesuai dengan Pasal 9 PMK 1/2020

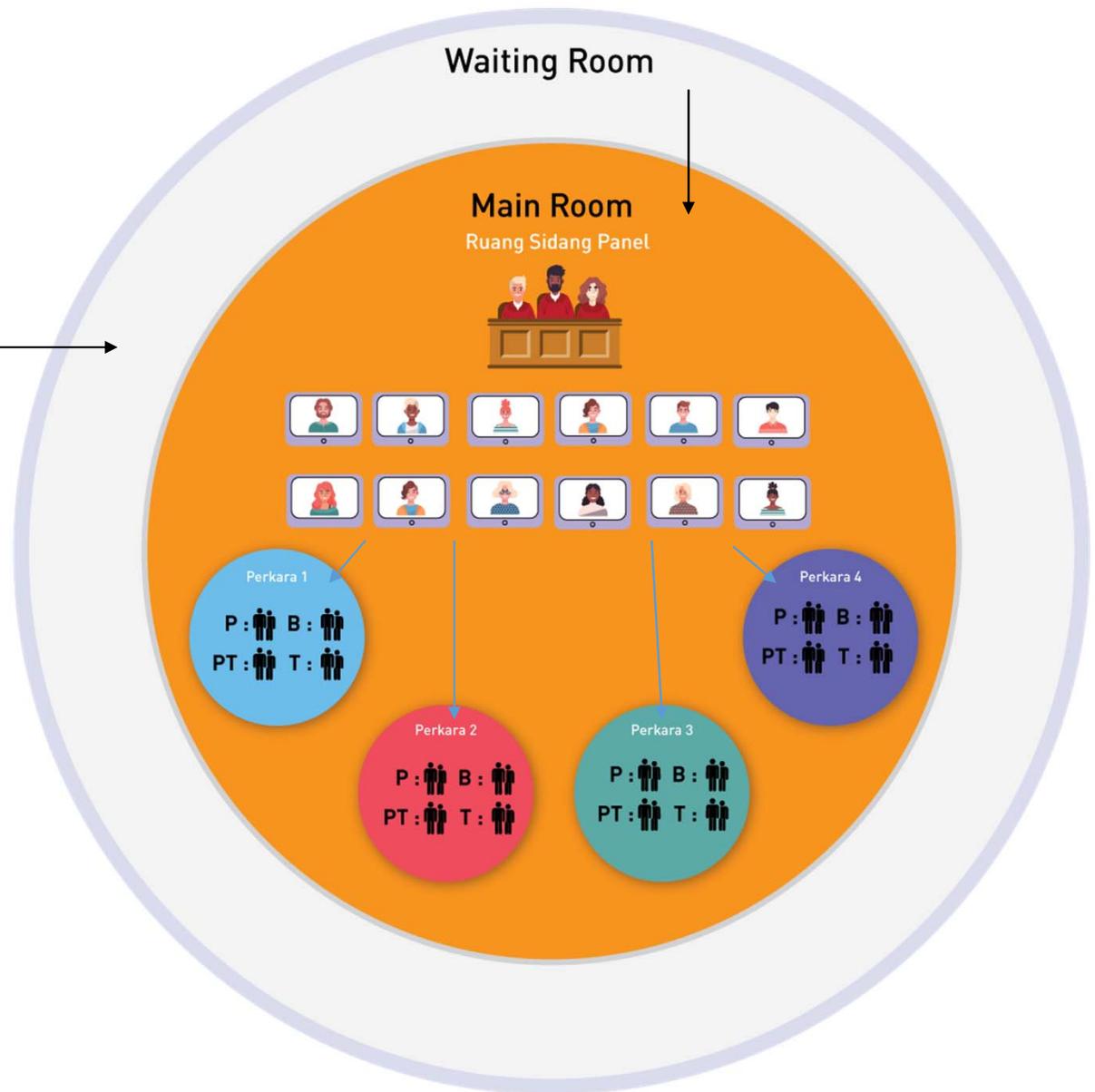


Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang Panel)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya didalam **Main Room (Ruang Sidang Panel)** Hakim Panel melakukan absensi per perkara dan pengenalan dengan para pihak yang hadir

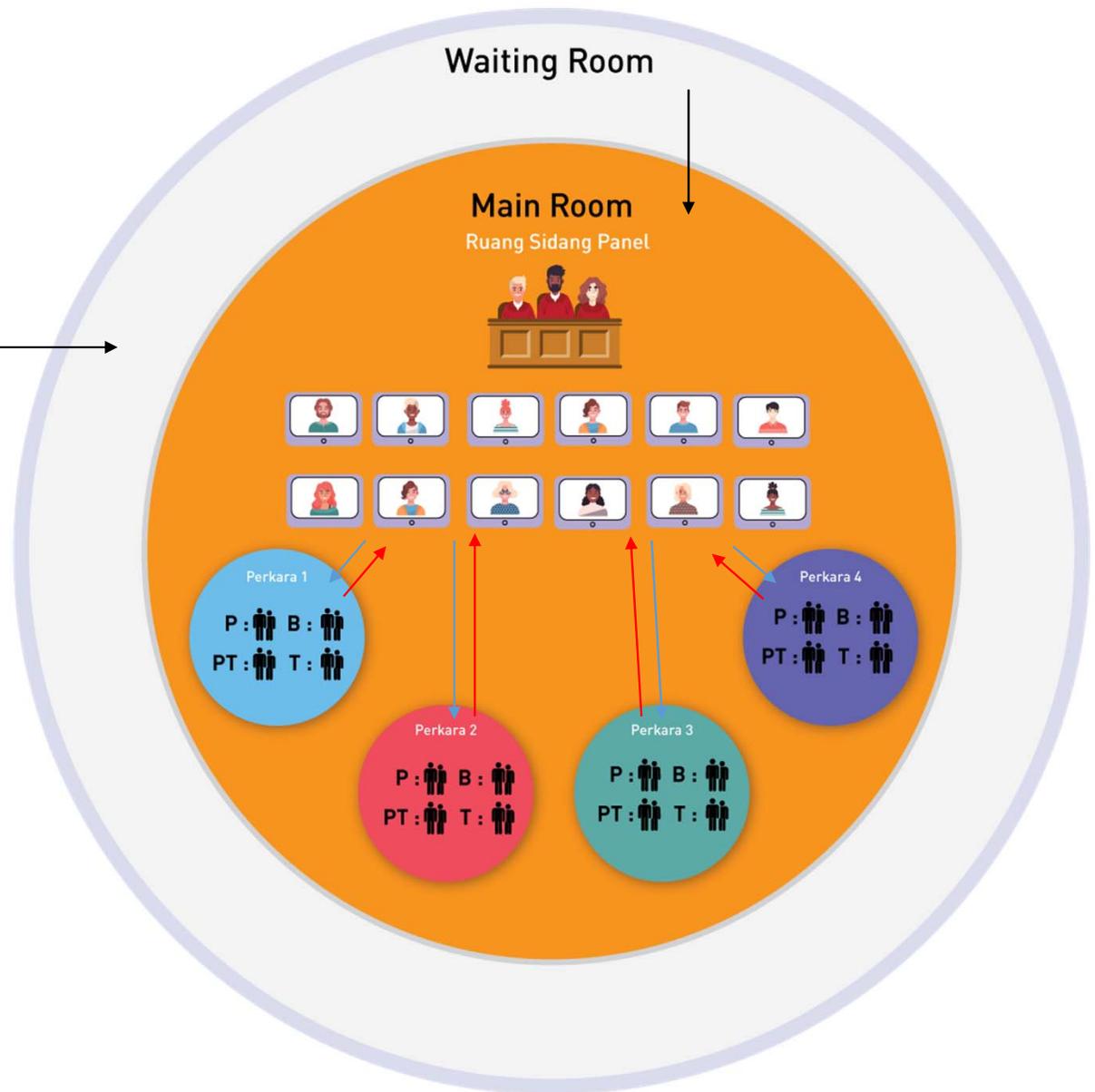


Para pihak dijoin ke Breakout Room masing-masing per perkara

Kemudian Hakim dijoinkan untuk melakukan pemeriksaan permohonan satu persatu di breakout room perkara



Setelah Hakim selesai melakukan pemeriksaan permohonan satu persatu di breakout room perkara, para pihak beserta Hakim dijoinkan kembali ke **Main Room (Ruang Sidang Panel)**



Tanda Tangan Elektronik

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

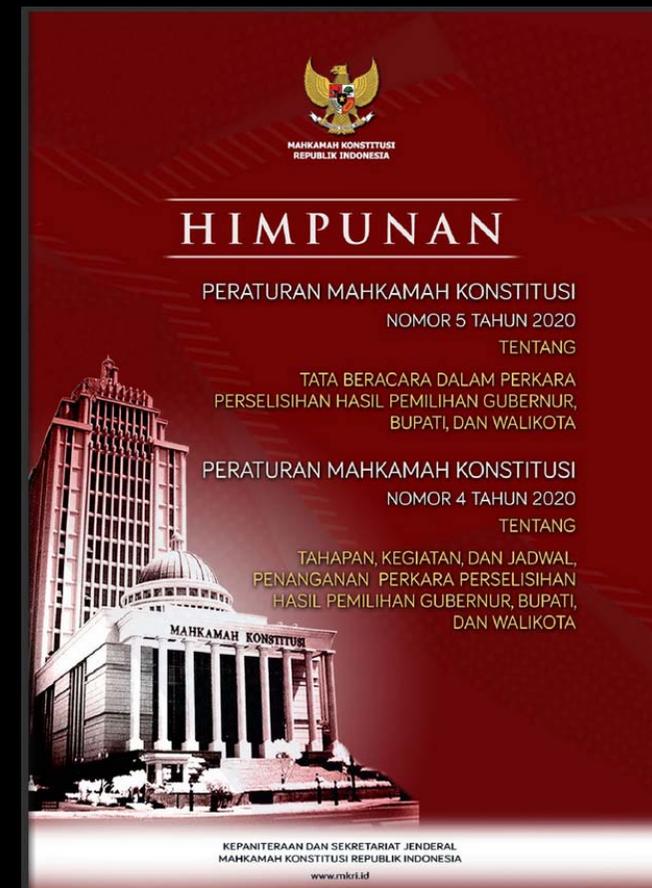
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

online.fliphtml5.com/zqllp/wcne



QRCode



TERIMA KASIH